

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR
LAMPUNG PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ekonomi Islam (SE)

Oleh

Novita Purnama Sari

NPM : 1551010089

Jurusan Ekonomi Islam



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR
TERHADAP PENDPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR
LAMPUNG
PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ekonomi Islam (SE)**

Oleh

**Novita Purnama Sari
NPM 1551010089**

Jurusan: Ekonomi Syariah



**Pembimbing I : Dr. Moh Bahrudin, M.A
Pembimbing II : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Pendapatan asli daerah (PAD) salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian dalam melaksanakan urusan daerah termasuk kota Bandar Lampung. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menetapkan sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dapat dipisahkan dan pendapatan asli yang sah. Pajak parkir dan retribusi parkir merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang telah didapatkan dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Bandar Lampung pajak parkir dan retribusi parkir disetiap tahunnya mengalami fluktuatif. Jika dilihat lebih rinci dari kedua variabel tersebut data penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan setiap tahunnya sedangkan penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan disetiap tahunnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Bandar Lampung tahun 2014-2018 dan bagaimana pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pajak dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di kota Bandar Lampung tahun 2014-2018, pajak dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dalam periode 2014-2018. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk data target dan realisasi pajak parkir, retribusi parkir serta data PAD yang diambil dari data yang bersumber pendapatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah (BPPRD) kota Bandar Lampung, wawancara dengan kepala perpajakan pajak maupun retribusi untuk memperkuat analisis peneliti dan studi pustaka. Hasil penelitian kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Bandar Lampung tahun 2014-2018 dapat dilihat bahwa pajak parkir dapat berkontribusi dalam menyumbangkan sebesar 0,78% pada tahun 2014, 0,80% pada tahun 2015, 0,84% pada tahun 2016, 0,74% pada tahun 2017, dan 1,09% pada tahun 2018 terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan retribusi parkir dapat menyumbangkan kontribusi sebesar 1,27% pada tahun 2014, 1,29% pada tahun 2015, 0,89% ditahun 2016, 0,80% pada tahun 2017 dan 0,87% pada tahun 2018 terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmen Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novita Purnama Sari

NPM : 1551010089

Tempat/Tgl Lahir : Bandar Lampung, 10 November 1996

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 98 Bumi Raya, Bumi Waras, Bandar Lampung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Persepektif Ekonomi Islam”** benar karya asli saya. Kecuali kutipan – kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 19 Desember 2019
Yang Membuat Pernyataan,



Novita Purnama Sari

NPM : 1551010089



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Sukarampe, Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Bandar Lampung Persepektif Ekonomi Islam

Nama : Novita Purnama Sari
NPM : 1551010089
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 23 Desember 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Moh. Bahrudin, M.A
NIP.195808241989031003

Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.Si.
NIP.

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Islam

Madnasir, S.E., M.Si.
NIP.197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Sukarama, Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Persepektif Ekonomi Islam**" disusun oleh **Novita Purnama Sari NPM 1551010089** Jurusan **Ekonomi Syari'ah** telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin 23 Desember 2019**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Hanif, S.E., M.Si

Sekretaris : M. Fikri Nugraha K, M.Pd

Penguji 1 : Deki Fermansyah, S.E., M.Si

Penguji 2 : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.Si

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

NIP. 19800801 200312 1 001



MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
٥٨

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum, di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (Q.S An-Nisa:58)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya yang telah memberikan kemudahan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan dari lubuk hati yang paling dalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua saya, yaitu Ayah saya Sohari (alm) dan Ibu saya Uniyati, yaahh skripsi ini saya buat untuk ayah terimakasih udah mendukung anakmu untuk bisa lanjut kuliah tapi maaf belum bisa menjadi seorang yang ayah mau “bidan” tapi aku kepengen ngelanjutkan perjuangan ayah selama ini menjadi wirausaha. Dan untuk Ibu, ibuu terimakasih selama ini udah membesarkan, merawat, mendoakan setiap sholat, tetap bersabar hadapin tingkah laku saya dan terimakasih banyak udah mendukung saya sampai dititik ini bahkan sampai nanti. Maaf selama ini belum bisa kasih terbaik buat Ibu. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu memuliakan Ayah dan Ibu di dunia maupun di akhirat. Aamiin
2. Semua kakak-kakak saya Rohayati, S.E, Asep Unandar, S.Pd. Siti Solehati, Amd, yang saya sayangi, Terimakasih atas perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan untuk adik kalian yang trakhir ini yang selalu mendoakan kesuksesan saya dalam menuntut ilmu.
3. Untuk keponakan tante, Tasya, Alisa, Fahri, Ezi, dan Fatir yang mau menemani tante berpergian disaat tante lagi penat serta yang selalu bikin tante tersenyum.

4. Alamamaterku tercinta yaitu UIN Raden Intan Lampung, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah tempat saya menuntut ilmu sampai detik ini.
5. Sahabat-sahabat Mts N 1 Tanjung Karang AADOGANL (Abu Abdullah Muhammad, S.Pd, M. Nur ali rouf, M. Dzaki Arifin, Octavia rahmawati, Geby Resta Damara, Ayu Maya Sari, dan Laras Erisna Pangestu) yang sampai detik ini maemberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah Swt menjaga persaudaraan kita.
6. Sahabat-sahabat Man 2 Bandar Lampung JAMBANku (Yolla, Khofiyatun,Weni, Lindri, Citra, dan Syariah) terimakasih telah menjadi sahabat ku sampai sekarang, jangan kelamaan jomblo ya guys.
7. Teman-teman SemlehoY (Ayu Avindanova, Tri Susanti, Rofiqoh Hasanah, Arini Wijayanti, Sri Wahyuni, Elsa Devi, Laila Fatmala Sari, Lulu Alfiyah,) yang telah menemaniku dari awal perkuliahan sampai sekarang dan membantu dalam penelitian skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Novita Purnama Sari dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Novita di lahirkan pada tanggal 10 November 1996 yang merupakan anak trakhir dari pasangan Bapak Sohari dan Ibu Uniyati serta memiliki satu saudara laki-laki dan dua kakak perempuan.

Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan Tk di TK Perwanida kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampug yang diselesaikan pada tahun 2003
2. Melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Pahoman, Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009.
3. Pada Tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012.
4. Di Tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015.
5. Kemudian di tahun 2015 alhamdulillah penulis dapat menurutkan pendidikan S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada prodi Ekonomi Syari'ah.

Bandar Lampung, 14 November 2019

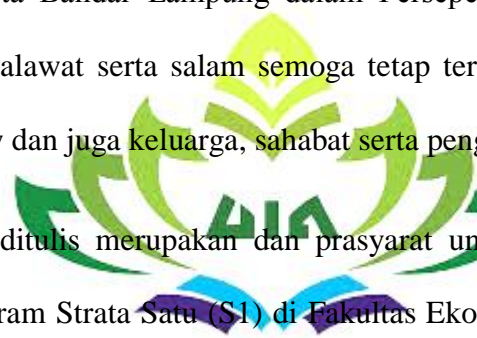
Penulis

Novita Purnama Sari

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan dan nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dalam Persepektif Ekonomi Islam” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan juga keluarga, sahabat serta pengikut beliau.



Skripsi ini ditulis merupakan dan prasyarat untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (ES) dalam bidang ilmu syariah.

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedal-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.M.,C.A.,Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir, S.E, M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Dr. Moh, Bahrudin, M.A selaku pembimbing I yang selalu mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
6. Perpustakaan Daerah Kota Bandar Lampung, Perpustakaan UIN Raden Intan dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Lampung yang telah menyediakan referensi buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya penulis ucapkan terimakasih banyak semoga apa yang telah kalian berikan menjadi amal sholeh dari Allah Swt dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para akademisi dan pembaca.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dengan dari kesempurnaan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang peneliti miliki. Penulis berharap penelitian ini akan menjadi sambungan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 19 Desember 2019

Penulis

Novita Purnama Sari





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Batasan Masalah	13
E. Rumusan Masalah	13
F. Tujuan Penelitian	13
G. Manfaat Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pendapatan Asli Daerah	
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	16
2. Landasan Hukum	17
3. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah	17
4. Sumber Pendapatan Asli Daerah	19
5. Pendapatan Asli Daerah Persepektif Ekonomi Islam	20
B. Perpajakan	
1. Perpajakan Secara Umum	23
2. Pajak Daerah	28
3. Pajak Parkir	34
4. Pajak Persepektif Ekonomi Islam	37
5. Hubungan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah	48

C. Retribusi	
1. Retribusi Secara Umum	49
2. Retribusi Daerah	52
3. Retribusi Parkir	55
4. Retribusi Persepektif Ekonomi Islam	56
5. Hubungan Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah	58
D. Penelitian Terdahulu	59

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	64
B. Sumber Data	64
C. Teknik Pengumpulan Data	66
D. Teknik Pengambilan Sampel	67
E. Langkah-langkah Pengelolaan Data	68
F. Metode Analisah Data	69

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	71
B. Hasil Analisis Data	
a. Analisis kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung	75
b. Analisis kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung	79
c. Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung	82
C. Pembahasan Hasil Penelitian	
a. Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung.....	83
b. Kontribusi Retribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Persepektif Ekonomi Islam	89

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2018	
Tabel 2 Realisasi Pajak Parkir, Retribusi Parkir, PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2018	
Tabel 3 Tarif Pajak Daerah Provinsi	34
Tabel 4 Tarif Pajak Daerah Kabupaten Kota	34
Tabel 5 Perbedaan Zakat dan Pajak	43
Tabel 6 Tarif Jizyah di Zaman Umar Bin Khattab	47
Tabel 7 Daftar Walikota Bandar Lampung Beserta Masa Jabatan	74
Tabel 8 Target dan Realisasi Pajak Parkir Tahun 2014-2018	77
Tabel 9 Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Bandar Lampung	79
Tabel 10 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2014-2018	80
Tabel 11 Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Bandar Lampung.....	.82
Rabel 12 Target dan Realisasi PAD Kota Bandar Lampung Tahun 14-2018.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Sebelum menjelaskan lebih rinci guna untuk lebih memahami dan memudahkan dalam membuat skripsi tentang kontribusi pajak dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Judul skripsi ini adalah **“Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah – istilah yang ada didalam judul tersebut diatas sebagai berikut:

1. Analisis :

Merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.¹

2. Kontribusi :

Suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.²

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*, (Bandung: CV Alfabeta, cetakan ke 23, 2016), h. 45

² T Guritno, *Kamus Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 76.

3. Retribusi Parkir :

Pungutan sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau fasilitas pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan umum telah dibuat oleh pemerintah³. Pengertian retribusi secara umum adalah “pembayaran – pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa – jasa Negara⁴. atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik langsung dapat ditunjuk.

4. Pajak Parkir :

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran⁵.

5. Pendapatan Asli Daerah :

Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi

³ Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2003), h. 287-288.

⁴ Rochmad Sumitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Jakarta: Eresco, 1979), h. 17.

⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 49.

daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah⁶.

6. Ekonomi Islam :

Ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam⁷.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah sebuah kajian mengenai Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Persepektif Ekonomi Islam.



B. ALASAN MEMILIH JUDUL

Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi “ Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam” yaitu sebagai berikut :

1. Secara Objektif

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang memiliki potensial untuk mmenunjang pembangunan daerah diantaranya pajak parkir dan retribusi parkir. Data yang peneliti terima dari BPPRD bahwa di tahun 2016 ada 202 wajib pajak dari 16 kecamatan yang ada Bandar Lampung yang sudah terdaftar, dan di tahun 2018 ada 257 wajib pajak

⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h..13

⁷ Mustafa Edwin Nasution, ed. al. *Penngenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), h. 16.

dari 18 kecamatan yang ada di Bandar Lampung yang memberikan kontribusinya serta potensi retribusi parkir semakin tinggi mengingat sudah banyak tempat titik dalam pemungutan retribusi dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di kota Bandar Lampung.

Berarti dengan adanya pertumbuhan tersebut pajak parkir maupun retribusi parkir seharusnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung dalam menunjang salah satu pendapatan daerah.

2. Secara Subjektif

Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni yang berhubungan dengan jurusan Ekonomi Syaria'ah. Bagi penulis banyak referensi pendukung dari tersedianya literatur baik primer maupun sekunder dan data – data penelitian yang menunjang dalam penelitian ini sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini kedepannya.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak merupakan peranan penting dalam membiayai keperluan Negara dalam rangka penyelenggara pembangunan serta menunjang pemerintahan daerahnya⁸ dan donasi pajak sebagai pos penerimaan dalam negeri telah terlihat sejak awal berdirinya Republik ini. Bersumber pada data APBN dari

⁸ Krisna Arta Anggar Kusuma dan Putu Wirawati, "Anallisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penigkatan PAD Sekabupaten/kota di Provinsi Bali", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 5 No. 3, 2013, h. 564.

tahun ke tahun yang secara rutin dipublikasikan oleh Dapertemen keuangan.⁹ Dengan meningkatnya penerimaan disektor perpajakan, diharapkan pula pemerintah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menengadahkan tangan kepada Negara lain.

Perkembangan yang ada saat ini, terutama pada informasi, komunikasi, teknologi dan transportasi dalam kehidupan masyarakat disegala bidang ekonomi dan perdagangan, pembangunan ekonomi merupakan sesuatu tahapan kegiatan menuju Indonesia yang lebih maju lagi dalam pembangunan ini masyarakat beserta pemerintah mampu menjadikan negara Indonesia sebagai Negara yang lebih mandiri dalam melaksanakan sistem pemerintahan.¹⁰

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut¹¹.

Otonomi bagi pemerintah daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak

⁹ Herry Purwono, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akutansi Pajak*, (Jakarta: Erlangga, 2010) h. 4.

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Aulia Poetri Rahmadhini, "Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Jombang", *Jurnal Akutansi Unesa*, Vol. 3 No. 2, 2015: 1-21

pembangunan daerah, terutama dalam melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi.

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah selanjutnya disebut PAD, maksud dari PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah.

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan otonomi daerah, keuangan daerah bersumber dari penerimaan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah merupakan sumber pendapatan daerah yang akan di kelola oleh Negara.

PAD memiliki tujuan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pasal 6 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah.¹²

Semakin tinggi sumber PAD maka akan semakin tinggi pemerintahan daerah untuk membiayai kebutuhan itu sendiri, dalam hal ini membuktikan

¹² Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 139.

bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya jika suatu daerah memiliki PAD sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. Bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20% tersebut, maka dikatakan suatu daerah tersebut akan kehilangan krebilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri¹³.

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai penerimaan Pedapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dalam tiga tahun terakhir 2016 sampai dengan 2018:



Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Bandar Lampung tahun 2014-2018

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	presentase (%)
2014	495.200.463.931	387.175.043.391	78,18
2015	769.108.142.606	394.899.945.876	51,35
2016	757.745.187.987	483.379.398.034	63,79
2017	994.795.696.600	622.233.601.418	62,55
2018	864.895.980.850	551.721.101.266	63,79
Rata-Rata	776.349.094.394	487.881.817.997	63,93

Sumber : BPPRD Kota Bandar Lampung

Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa tealisasi jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 sebesar Rp.

¹³ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017) h. 19.

287.175.043.391 mengalami peningkatan ditahun selanjutnya yakni di tahun 2015 sebesar Rp 394.899.945.876, pada tahun 2016 sebesar Rp. 483.379.398.034 lalu mengalami peningkatan sebesar Rp. 622.233.601.418 pada tahun 2017, kemudian tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar Rp. 551.721.101.266. Hal tersebut setiap tahunnya tidak ada yang mencapai target dan berfluktuatif. Dalam konteks pajak dan retribusi daerah, terdapat tiga Undang – Undang yang menjadi dasar pungutan pajak dan retribusi daerah, yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 sebagai Pengganti Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.¹⁴

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi yang beraneka ragam, mulai dari pertokoan, industry, pusat perbelanjaan, sampai pariwisata. Sehingga memerlukan tempat untuk lahan parkir untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian suatu daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka PAD harus ditingkatkan dengan salah satu upaya dalam peningkatan dilakukan oleh badan pengelolaann pajak dan retribusi kota Bandar Lampung dan retribusi parkir dilakukan oleh dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Meliputi pendataan subjek maupun objek sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik.

¹⁴ Rahmawati Widya Putri, “Analisis Kontribusi Retrubusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang”, *JESP*-Vol 8 No 1 Maret 2016.

Tabel 2
Realisasi Pajak Parkir, Retribusi Parkir Dan PAD
Kota Bandar Lampung Tahun 2016 – 2018

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2014	3.034.574.324	4.925.028.400	387.175.043.391
2015	3.146.510.364	5.128.277.000	394.899.945.876
2016	4.070.125.335,00	4.306.501.000	483.379.398.034
2017	4.625.054.848,00	4.967.596.000	612.809.680.623
2018	6.027.330.000,00	4.757.470.000	551.721.101.266

Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung dan Dishub Kota Bandar Lampung, data diolah PAD kota Bandar Lampung, Pajak dan Retribusi Parkir mengalami

kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan sumber pendapatan didaerahnya dari pajak parkir dan retribusi parkir, akan tetapi hal ini tidak bias dijadikan acuan dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir yang dilakukan oleh pemerintah.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dengan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.¹⁵

Sesuai teori pajak daerah, teori *Development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah

¹⁵ TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai*, (Yogyakarta : Andi, 2013) h. 1.

dari pada pemerintah pusat karena mereka dapat melihat secara langsung manfaat serta pembangunan di daerahnya. Pajak pemerintah daerah secara politik dapat diterima. Dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tarif, siapa yang harus membayar, sangsi terhadap pelanggannya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislatif sebagai representasi masyarakat¹⁶. Hal ini didukung oleh firman Allah dalam Al-Quran Q.S At-Taubah ayat 29 yang menyerukan:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya :

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-Taubah (9) : 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Perangilah mereka sampai mereka beriman atau menyerahkan jizyah dengan tunduk dan taat serta tidak membangkang, agar mereka menyumbang untuk menguatkan anggaran belanja negara Islam. Jizyah adalah salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka.

Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Pelaksanaan disini bersifat ekonomis

¹⁶ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang : UB Press, September 2017) h. 45.

karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Retribusi juga dapat diartikan sebagai pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemda/pembayaran tersebut berdasarkan atas pelayanan yang diberikan secara langsung dinikmati perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaan didasarkan atas peraturan yang berlaku.¹⁷

Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan daerah, yang memiliki peranan dan kontribusi dalam pendapatan asli daerah. Salah satu dari retribusi ialah retribusi parkir, retribusi parkir bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan retribusi parkir termasuk dalam retribusi jasa usaha adalah retribusi pelayanan parkir di tempat khusus parkir.¹⁸

Untuk mengenali dengan baik potensi pajak parkir yang ada guna mendukung optimalisasi pengelolaan pajak parkir di Kota Bandar Lampung dalam perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat tiap tahunnya di Kota Bandar Lampung, tidak tutup kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor parkir. Pendapatan asli daerah dari sektor

¹⁷ Dimas dwi anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi*, h. 239.

¹⁸ Rahmawati Widya Putri, "Analisis Kontribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang", *JESP*- Vol 8 No 1 Maret 2016.

parkir dapat dikatakan cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah.¹⁹

Pajak Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung pada triwulan pertama tahun 2018 baaru menyentuh angka 17.36% atau kuranglebih Rp94 miliar dari target PAD sebesar Rp541 miliar. Dari data yang dihimpun oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, pendapatan pajak daerah Kota Bandar Lampung di triwulan pertama di tahun 2018 terhitung tanggal 13 April 2018 masih jauh dari target pendapatan daerah yakni hanya mencapai 17.36%. Plt Walikota Bandar Lampung M. Yusuf Kohar menjelaskan sector – sector yang belum efisien dalam pembayaran pajak yakni, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hiburan, pajak restoran, pajak parkir dan reklame.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas untuk mengadakan penelitian terkait kontribusi pajak dan retribusi parkir yang lebih spesifik. Dengan pungutan pajak parkir secara professional, transparan, dan penuh integritas, serta menjalankan prinsip akuntabilitas publik yang menjamin bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak-pihak yang bersinggungan dengan dampak kebijakan. mengenai pajak parkir maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam.”**

¹⁹ Nariana, “Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang”, (*Jurnal STIE MDP 2013*)

²⁰ Mediansyah, “Duh PAD Bandar Lampung Jauh dari Target hanya 17,36%”. (On-Line), tersedia di: <https://www.kupastuntas.co/2018/04/duh-pad-bandar-lampung-jauh-dari-target-hanya-1736#> diakses tanggal 24 Januari 2019.

D. BATASAN MASALAH

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari pokok-pokok permasalahan, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada pengaruh variabel independen yakni kontribusi pajak dan retribusi parkir terhadap variabel-dependen yakni pendapatan asli daerah (PAD) di Bandar Lampung 2016-2018.

E. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latarbelakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Persepektif Ekonomi Islam ?

F. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dari tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam.

G. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Untuk digunakan sebagai literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai teori yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

2. Secara Praktis

a. Bagi Dispenda Kota Bandar Lampung

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor Pajak retribusi parkir.

b. Bagi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti – peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian yang dilakukan berkaitan dengan objek penelitian yang sama.

c. Bagi Penulis (Peneliti)

Penelitian ini digunakan untuk mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis.

d. **Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan lebih dalam setelah membaca hasil penelitian ini yang berkaitan dengan pontensi pajak parkir di kota Bandar Lampung.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan merupakan pos penting dari laporan keuangan dan merupakan suatu tolak ukur atas berhasilnya suatu perusahaan atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Pendapatan dalam suatu daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode tertentu menjadi hak daerah, setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing dengan mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk menggerakkan pembangunan daerah terutama melalui potensi pendapatann asli daerah (PAD).²¹

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini merupakan salah satu indikator dalam tingkat kemajuan suatu daerah setempat. Daerah yang dianggap maju ialah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Karena tingginya PAD yang dapat diterima oleh suatu daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang disuatu daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dilarang untuk melakukan pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya

²¹ Reza Arditia, "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya", Jurnal Universitas Surabaya

ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang akhirnya kurang mendukung dunia usaha dan investasi.

Menurut Halim (2011:101) pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah, PAD juga dipisahkan dalam 4 jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Menurut Mardiasmo Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan hasil setoran pajak daerah, retribusi daerah dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Sebagaimana yang disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.²² Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan pos teripenting disuatu Negara dimana penerimaan PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah serta penerimaan pendapatan yang sah yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

²² Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, ... h. 23

2. Landasan Hukum Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya sesuai dengan Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah selanjutnya di sebut PAD, maksud dari PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah. Yang memiliki tujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang – undang No 28 tahun 2009 yaitu “sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah”.²³

3. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas: (1) pendapatan asli daerah yang disingkat PAD, adalah merupakan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

²³ Feisly Kesek, "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado", Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis Akutansi Vol 1. No 4, 2013 ISSN 2302-1174

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, (2) dana perimbangan, serta (3) lain-lain pendapatan yang sah.²⁴

a. **Pendapatan Asli Daerah**, ialah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan pada masyarakat, serta pemanfaat sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.²⁵

b. **Dana perimbangan**, adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, transparansi, demokratis, dan efisiensi dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan, kondisi serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada kepala daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.²⁶

c. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**, ialah merupakan pendapatan daerah yang tidak dimasukkan dalam pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan melainkan pendapatan ini terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah bersumber dari pihak lain yang diberikan dengan tidak mengikat dan tidak ada kewajiban bagi daerah untuk mengembalikannya. Pendapatan dana darurat dalam pengalokasian dana darurat dalam

²⁴ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.135-136

APBN ditunjukan dalam keadaan yang mendesak yang diakibatkan oleh bencana alam.²⁷

4. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain – lain Pendapatan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang dapat digali dalam suatu wilayah yang bersangkutan seperti :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dan bersifat memaksa orang pribadi atau badan yang diberikan kepada daerah berdasarkan undang-undang. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian suatu daerah, maka pemerintah daerah terus melakukan pemetaan dalam potensi dan perluasan objek pajak daerah. Meskipun demikian, penetapan tarif dan penarikan pajak dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi memperhatikan potensi daerah,

²⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: Ub Press, 2017), h. 18

²⁶ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h. 10

²⁷ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan, ...* h. 34

pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan pajak oleh pemerintahan daerah.²⁸

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah, adalah pengutan yang dikenakan kepada masyarakat yang secara langsung dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemungutannya juga ditungangkan dalam peraturan daerah.²⁹

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan – badan usaha milik daerah maupun lembaga – lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

d. Lain – lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah, adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.³⁰

5. Pendapatan Asli Daerah Persepektif Ekonomi Islam

Pendapatan Asli Daerah dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan resmi dan pendapatan tidak resmi.

²⁸ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 106

²⁹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan, ...* h.

³⁰ *Ibid.*

Pendapatan tidak resmi terdiri dari ghanimah, sedekah yang dipergunakan hanya untuk manfaat tertentu. Pendapatan resmi daerah terdiri dari fay'I, jizyah, kharaj, ushr, bea cukai, Negara berhak mempelajari unruk kepentingan seluruh penduduk seperti keamanan, transportasi, pendidikan dan sebagainya. Adapun beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Islam, yaitu

a. **Jizyah**

Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non muslim di Negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan property dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing. Jadi *jizyah* tersebut diambil akibat kekufuran mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surah Al-Taubah ayat 29.³¹

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya :

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk"(QS. At-Taubah (9) : 29)

³¹ Gusfahmi, *Edisi Revisi Pajak Menurut Syariah*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 103

b. **Kharaj**

Kharaj adalah biaya yang dikenakan pada kepemilikan atas tanah atau hasil tanah semacam kewajiban yang harus dipenuhi. Dimana para wilayah atau daerah yang ditaklukkan harus membayar kepada Negara Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surah Al-Mu'minun ayat 72³²:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Artinya:

"Atau kamu meminta upah kepada mereka?", Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik" (QS. Al-Mu'minun (40) : 72).

c. **Ushr**

Di kalangan ahli fiqih 10% memiliki dua arti yaitu, 10% pertama dari lahan pertanian yang disirami oleh air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari orang muslim dan didistribusikan sebagaimana zakat. Dan 10% yang kedua diambil dari pedang-pedang kafir yang memasuki wilayah islam karena membawa barang dagangan. Objek bea cukai ini adalah nilai barang dagang yang melintas wilayah pabean islam. Karena termasuk sumber pendapatan penuh maka ushr digunakan untuk kepentingan umum Negara secara luas.³³

³² Muhammad Riza, "Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj pada Masa Umar Bin Khattab RA", *j-EBIS*, Vol 2 No 2, 2016, h. 3

³³ Gusfahmi, *Edisi Revisi Pajak*, ... h. 112.

B. Perpajakan

1. Perpajakan Secara Umum

a. Pengertian Pajak

Ada beberapa definisi pajak yang dirumuskan oleh beberapa ahli dalam bidang keuangan Negara, Ekonomi dan Hukum. Beberapa definisi pajak menurut para ahli sebagai berikut:

- 1) C. F Bastable menyatakan bahwa pajak adalah *a compulsory contribution of the wealth of a person or body of a person for the service of the public powers.*
- 2) H. C Adams mendefinisikan pajak sebagai *a contribution from citizen to the support on the state.*
- 3) Rochmad Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jassa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³⁴

Jadi pada kesimpulannya pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dengan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

³⁴ Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2003), h. 12

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan.³⁵

Didefinisikan sebagai iuran tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran – pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain³⁶ :

- 1) Salah satu iuran dari masyarakat ialah pajak dan Negara memiliki hak untuk memungut pajak sesuai undang-undang, baik melalui pemerintahan pusat ataupun daerah iuran yang dibayarkan berupa uang bukan barang.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan sifat pemungutan pajak dapat dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam perundang – undangan beserta aturan pelaksanaan.
- 3) Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
- 4) Dana yang di dapat dalam pajak digunakan untuk pembiayaan Negara.

b. Dasar Hukum Perpajakan

Terdapat beberapa pengertian yuridis tentang pajak. Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 adanya perubahan Ketiga

³⁵ TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai*, (Yogyakarta : Andi, 2013) h. 1.

³⁶ Supramono dan Theresia Woro Damayanti,, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta :CV Andi Offset, 2010), h. 2

UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pajak ialah.

“kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa yang telah diatur dalam Undang-undang dengan tidak mendapatkan timbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat”.

Menurut UU No. 34 Tahun 2002 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa :

“Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan daerah.”

Undang-undang yang terbaru yaitu UU No. 28 Tahun 2009 pengertian pajak daerah adalah :

“pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”³⁷

c. Fungsi Pajak

Dalam fungsi pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *Budgetair* dan fungsi *regulerend*. Pendefisian pajak *budgetair* sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk pengeluaran-pengeluaran. Sedangkan pajak *regulerend* sebagai alat untuk mengatur maupun melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.³⁸

³⁷ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda*, ... h, 119

³⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, ... h. 2

1) Fungsi *budgetair*

Lerory Beaulieu mengatakan pajak bahwa “bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Fungsi pajak seperti yang disampaikan Lerory Beaulieu lebih mendepankan fungsi *budgeter* dimana belum mengarah pada fungsi pengaturan (*regulated*). Pendefinisian dalam perspektif *budgeter* menginginkan adanya netralitas pajak. Pajak haruslah ditunjukan kepada usaha untuk menutupi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.³⁹

Sehingga dalam fungsi yang biasa disebut dengan fungsi fiskal yaitu pajak sebagai alat utama untuk memasukan uang ke kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku serta fungsi Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.⁴⁰

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau program tertentu dari pemerintah dan pajak sebagai alat untuk melaksanakan sebuah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial.

³⁹ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan,*, h. 104-105

⁴⁰ Nurul Huda, ed. at, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2015), h. 106.

Dalam fungsi pengaturan (*regulated*), fungsi pajak selain sebagai sumber pendapatan juga sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan bila perlu ngebu susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.⁴¹

d. **Pengelompokan Pajak**

Dalam pengelompoakan pajak terbagi menjadi tiga yakni :

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung, ialah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan oleh orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Tidak Langsung, ialah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.⁴²

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

⁴¹ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan ,*, h. 105

⁴² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi, ...* h. 6

- b) Pajak Objektif, ialah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan akan digunakan untuk pembangunan rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak atas barang mewah, dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah dan digunakan untuk membiyai rumah tangga daerah.⁴³



2. Pajak Daerah

a. Teori Pajak Daerah

Teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah.

Bahl dan Smoke , berpendapat bahwa:

⁴³ *Ibid.*

“local government taxes must be politically acceptable. One rule of thumb is that less visible taxes tend to be more acceptable.”

Pajak pemerintahan daerah harus secara politik dapat diterima. Dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tarif siapa yang harus membayar, sanksi terhadap pelanggarannya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislatif sebagai representasi masyarakat.⁴⁴

Adapun beberapa kriteria pajak daerah yang baik dikemukakan oleh Bird, yakni :

- 
- a. That easy to administer locally*
 - b. That are imposed solely (or mainly) on local resident*
 - c. That do not raise problem government or between sub nasional and national government*

Menurut pendapat Bird tersebut diharapkan agar pajak daerah dapat secara mudah dikelola dan dipungut oleh pemerintahan daerah dan pungutan ini hanya berdampak pada masyarakat setempat. Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-permasalahan akibat penetapan pemungutan pajak daerah tersebut, hal ini berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintahan yang lebih tinggi.⁴⁵

⁴⁴ Damas Dwi anggoro, *Pajak Daerah dan ...*, h. 45

⁴⁵ *Ibid*, h 46

b. Pengertian Pajak Daerah

Meurut Mardiasmo mengatakan bahwa “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah demi kemakmuran rakyatnya”.⁴⁶

Sedangkan menurut Damas menyatakan bahwa “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau suatu badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang – undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib setiap rakyat kepada Negara dalam peranserta untuk memajukan dalam pembangunan daerah yang dasar pengenaannya berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.⁴⁷

c. Landasan Hukum Pajak Daerah

Dalam Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat perubahan pengertian pajak antara undang-undang lama

⁴⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, ... h. 12

⁴⁷ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan*, ... h. 46

dengan yang baru. Menurut UU No, 34 Tahun 2000 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah”⁴⁸.

Undang-undang yang baru yaitu UU No. 28 Tahun 2009, menjelaskan bahwa pajak daerah adalah:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah komtribusi wajib kepada daerah yang berutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”⁴⁹

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis daerah. berikut ini merupakan Dasar pengenaan Pajak Provinsi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas hasil perkalian dari dua unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- 4) Pajak Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air.

⁴⁸ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda*, ... h, 119

⁴⁹ *Ibid.*

- 5) Pajak Rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok.

Dibawah ini merupakan dasar pengenaan pajak kabupaten/kota :

- 1) Pajak Hotel dikenakan dalam pajak dari jumlah pembayaran yang harus dibayar kepada hotel.
- 2) Pajak Restoran akan dikenakan dalam pajak dari jumlah uang yang diterima oleh penyelenggaranya.
- 3) Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- 4) Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.
- 5) Pajak Penerang Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
- 6) Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- 7) Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah .
- 8) Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung wallet.
- 9) PBB perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP).
- 10) BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).⁵⁰

⁵⁰ Damas Dwi anggoro, *Pajak Daerah dan ...*, h. 29

d. Tarif Pajak Daerah

Salah satu unsur dalam penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintahan daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah.

Tabel 3
Tarif Pajak Daerah Provinsi

No.	Pajak Provinsi	UU28/2009
1	Pajak Kendaraan Bermotor	10%
2	Bea Balik Nama Kend Bermotor	10%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10%
4	Pajak Air Permukaan	10%
5	Pajak Rokok	10%

Sumber; Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 4
Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota

No.	Pajak Kabupaten/Kota	UU28/2009
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak Restoran	10%
3	Pajak Hiburan	75%*
4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Penerang Jalan	10%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
7	Pajak Parkir	30%
8	Pajak Air Tanah	20%
9	Pajak Sarang Burung Walet	10%
10	BPHTB	5%
11	PBB Perdesaan dan Perkotaan	0.30%

*) Untuk Jenis Hiburan Tertentu

Sumber: Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau masyarakat dari penetapan tarif yang berlalu membebani. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak seperti Kendaraan Bermotor. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 ditetapkan juga tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor, sehingga wajib pajak tidak mendapatkan keuntungan apakah akan mendaftar pajaknya di DKI Jakarta, Jawa Barat, atau Provinsi lainnya.⁵¹

3. Pajak Parkir

a. Pengertian Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.⁵²

Dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak parkir diatur dalam pasal 62 sampai pasal 66. Pengelolaan perparkiran merupakan salah satu sub sistem dalam pengendalian lalu lintas, dimana efisiensi pengelolaan parkir dapat menciptakan lalu lintas di sebuah kawasan tersebut menjadi lebih tertib dan lancar.

⁵¹ *Ibid.* h. 66-68

⁵² Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 49.

Berdasarkan hukum permintaan dalam teori ekonomi dengan diterapkannya kebijakan tarif, semakin tinggi tarif (pengeluaran untuk parkir) maka diharapkan jumlah pengguna ruang parkir berkurang. Dengan berkurangnya kendaraan kendaraan di ruang parkir akan mengalihkan masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dan akan semakin menurunkan jumlah kendaraan yang beraada di jalan raya sehingga kepadataan lalu lintas berkurang.⁵³

b. Objek dan Subjek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir, pada pajak parkir yang menjadi suatu objek pajak parkir ialah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir antara lain : Gedung Parkir, Perantaran Parkir, Garasi Kendaraan Bermotor yang memungut bayaran, dan Tempat penitipan kendaraan bermotor.

Adapun objek yang tidak dikenakan dari pajak parkir ialah penyelenggraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri, penyelenggaraan tempat parkir untuk kedutaan, konsultan, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik, peyelenggaraan

⁵³ *Ibid.*

tempat parkir di tempat peribadata, pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sendiri.⁵⁴

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggaraan tempat parkir. Dengan demikian pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar pajak, sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.⁵⁵

c. **Tarif Pajak Parkir dan Perhitungan Pajak Parkir**

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Tarif ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing – masing daerah. Sehingga setiap daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang berbeda dengan kabupaten/ kota lainnya selama tidak melebihi tarif yang maksimal yang sudah ditetapkan Undang – undang.

Perhitungan Pajak Parkir, besaran suatu pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar

⁵⁴ Caruni Mulya Firdausy, *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, cet ke 2, 2018), h. 111

⁵⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan, ...* h. 202

pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau} \\ &\quad \text{uang seharusnya dibayar kepada} \\ &\quad \text{penyelenggaraa tempat parkir.}^{56}\end{aligned}$$

4. Pajak Persepektif Ekonomi Islam

Indonesia bukanlah Negara islam walaupun mayoritas masyarakatnya beragama islam dengan begitu kita akan bias memaklumkan kedudukan zakat dan pajak dengan segala peredaannya yakni zakat yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulullah SAW kepada orang-orang beriman unyul mengharapkan ridha-Nya, sedangkan pajak diwajibkan oleh Negara kepada warga Negara yang berdasarkan undang-undang yang pungutunnya dapat dipaksakaan. Berikut adalah pajak dan retribusi daerah dalam islam pada zaman Rasulullah SAW.

Dalam catatan Qardawi, beberapa ulama mendukung pengintegrasian zakat pajak, akan tetapi baru pada batas niat saja. Imam Nawawi dan Mahzab Syafi'I, Imam Ahmad dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa membayar pajak dengan niatan zakat dibolehkan, dan karenanya kaum Muslim cukup membayar pajak. Sementara Ibn Hajar al-Hayaymi dari Mahzab Syafi'I, Ibn Abidin dari Mahzab Hanafi, dan Syeikh Ulaith dari

⁵⁶ *Ibid.* h. 203

Mahzab Maliki berpendapat bahwa sebaliknya, zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda dan karena pembayaran atas pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat.⁵⁷

Menurut Yusuf Qaradhaw pajak ialah suatu keharusan yang ditetapkan terhadap seorang wajib pajak yang harus disetorkan oleh kepala Negara berdasarkan ketentuan tanpa mendapatkan prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, politik, social, dan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara⁵⁸. Berikut beberapa pendapat dalam islam yang mendekati pajak :

a. **Zakat**

1) *Pengertian Zakat*

Zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna *al-Numuw* (menumbuhkan), *al-ziadah* (menambah), *Al- Baraqah* (memberatkan), dan *Al-Thathhir* (menyucikan). Zakat menurut bahasa artinya adalah “berkembang” adapun menurut syara’ zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu. Secara terminologi, zakat menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan mengeluarkan jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak,

⁵⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 503.

⁵⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 32

membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.⁵⁹

Secara definisi, Mahzab Maliki mendefinisikan zakat sebagai berikut:

Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuatitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq)-nya Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang maupun bukan pertanian.

Sedangkan Mahzab Hanafi mendefinisikan zakat:

Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah Swt.

Diantara hadis yang paling populer mengenai zakat adalah:

“Dalam Hadis riwayat Ibnu Umar ra., ia berkata: Nabi SAW, bersabda: Islam dibangun diatas lima perkara, mengesakan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan menunaikan haji.” (HR Bukhari dan Muslim).⁶⁰

Merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah mengeluarkan syariat-syariat islam yang ditelah diberikan kepada berbagai untuk masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariat islam.⁶¹

2) Subjek (Wajib) Zakat

a) Muslim

Zakat menurut hadis, termasuk rukun Islam. Oleh karena itu, subjeknya seorang muslim. Ayat-ayat tentang zakat pun,

⁵⁹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.239

⁶⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, ... h. 93

⁶¹ *Ibid.*

umumnya didahului dengan perintah shalat, yang memperlihatkan bahwa subjek zakat adalah orang Islam. Menurut Nabhani, “zakat dari segi perolehannya tidak akan dikumpulkan selain dari harta orang Islam, dan bukan dari orang non-muslim. Zakat tidak sama dengan pajak pada umumnya, melainkan hanya merupakan salah satu bentuk ibadah, dan dianggap sebagai salah satu rukun Islam. Zakat tersebut tidak gugur dari seseorang muslim selama diwajibkan dalam hartanya. Zakat tersebut diwajibkan kepada seseorang muslim yang sudah mencapai atau memiliki satu nisbah, sebagai kelebihan dari utang-utang dan kebutuhannya.”⁶²

b) Orang Kaya

Menurut Al-Qur'an surat At-Taubah:103, zakat harus dipungut oleh pemerintah, yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Sebagaimana hadis Rasulullah yang memerintahkan kepada Mu'az bin Jabal yang menjadi Gubernur di Yaman agar mereka memungut zakat dari orang-orang kaya yang kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Oleh karenanya pemungutan zakat dilakukan dari orang kaya dan pelaksanaannya mutlak ditangani oleh pemerintah melalui satu lembaga khusus (amil zakat).

⁶² *Ibid.*

c) Objek Zakat

Zakat merupakan pembayaran tahunan (*haul*) kecuali atas hasil pertanian, diwajibkan bagi kaum muslim yang kaya atas kekayaan mereka. Ia ditetapkan atas bentuk-bentuk kekayaan yang memiliki kemampuan untuk berkembang dari sisi nilainya (emas, perak) atau dapat menghasilkan kekayaan lebih lanjut, seperti ternak, produksi pertanian dan barang dagang. Oleh karena itu, kepemilikan yang berpotensi berkembang merupakan persyaratan pertama penetapan zakat. Jadi objeknya jelas adalah harta (*mal*) bukan jiwa (*an nafs*).

Zakat mulai diwajibkan atas kaum muslim yang kaya pada tahun kedua hijriyah yang menjadi sumber terpenting pendapatan Negara Islam karena keamanan social lainnya. Menurut An-Nabhani, harta zakat adalah salah satu jenis harta Baitul Mal (penerimaan Negara). Namun, Zakat itu berbeda dari jenis harta yang lain dari segi perolehannya dan dari segi pembelanjanya.⁶³

⁶³ Gusfahmi, *Edisi Revisi Pajak Menurut Syariah*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-3, 2017), h. 91-97 .

3) Perbedaan dan Persamaan antara Zakat dan Pajak

Tabel 5
Perbedaan Zakat dan Pajak

Zakat	Pajak
<ul style="list-style-type: none">- Merupakan kewajiban agama dan merupakan bentuk ibadah- Diwajibkan kepada seluruh umat Islam disuatu Negara- Sumber dan besar zakat ditentukan dalam kitab Al-Qur'an dan Hadis dan tidak boleh diubah oleh siapaun- Zakat dikenakan bukan terhadap uang saja melaikan kepada barang-barang komersil, hasil pertanian, peternakan, barang tambang dan ornament	<ul style="list-style-type: none">- Merupakan kewajiban ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah- Dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang agama maupun ras- Besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan pengeluaran pemerintah- Pajak dikenakan terhadap uang

Adapun persamaan antara zakat dan pajak sebagai berikut:

- a) Unsur paksaan dan kewajiban merupakan cara untuk menghasilkan pajak.
- b) Pajak harus disetor kepada lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka zakat pun disetorkan kepada pmerintahan sebagai amil zakat.
- c) Jika pajak mempuyai tujuan yang kemasyarakatan, ekonomi, dan politik, zakat pun memiliki tujuan yang lebih luas aspeknya dari aspek yang disebutkan untuk pajak.⁶⁴

⁶⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga, ...* h. 276

b. Jizyah

1) Pengertian *Jizyah*

Istilah *Jizyah* berasal dari kata *Jaza'* yang berarti kompensasi. Dalam keuangan Islam, istilah tersebut digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non-muslim (*ahl al-dzimmah*) yang ada di Negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama.⁶⁵

Dengan kata lain, *jizyah* ialah kewajiban keuangan atas penduduk non-Muslim di Negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing. Dasar perintahnya adalah ada di Al-Qur'an surah At-Taubah: 29.

أَشْتَرُوا بِعَاقِبَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Swt dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S Al-Taubah (9) : 29).

Rasullah Saw, Bersabda:

Dari Ibnu Syihab Umar bin Khattab mengatakan: Rasullah Saw. Bersabda, "Aku perintahkan memerangi manusi hingga mereka mengucapkan 'La ilaha illallah', maka mereka sudah mengucapkannya, niscaya mereka sudah memelihara dariku

⁶⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, ... h, 104

darah dan harta benda mereka, selain dengan haknya dan penghitungan mereka itu kepada Allah Swt.” (HR Bukhari).

2) Subjek Jizyah

Berdasarkan QS Al-Taubah: 29 “*Perangi orang-orang yang tidak beriman*”, Maka Jizyah diambil dari kalangan ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Menurut Abu Yusuf, mereka (yang dikenakan jizyah) adalah terdiri dari semua ahli syirik dari kalangan Majusi, para penyembah berhala, penyembah api dan batu, serta kaum atheis, kecuali orang-orang murtad dan para penyembah berhala dari bangsa Arab.

Jizyah hanya dikenakan kepada ahlu dzimmah (orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam) yang mengelola tanah-tanah yang ditaklukan kaum muslimin.

3) Objek Jizyah

Objek dari Jizyah ini adalah jiwa (diri) kaum kafir karena kekafirannya. Oleh sebab itu, ia tidak dikenakan terhadap kaum muslimin. Jadi semacam pajak kepala zaman sekarang, mereka membayar sesuai dengan kondisi (misalnya jenis pekerjaan) dan tidak melihat dari banyaknya harta mereka.

4) Dasar Pengenaan Jizyah

Jizyah adalah lambang ketundukan seseorang pada kekuasaan Islam. Ia juga memiliki legitimasi lain di antaranya adalah dua sebab berikut:

- a) Para pembayar *Jizyah* bias menikmati fasilitas-fasilitas umum bersama kaum muslimin, seperti pengadilan, kepolisian, dan lain-lainnya
- b) Orang-orang yang mampu dari kalangan ahli kitab tidak diwajibkan untuk mengangkat senjata dan membela tanah air. Sebab yang berkewajiban melakukan semua itu adalah kaum muslimin. Oleh karenanya, ahli kitab harus membayar pajak sebagai kompensasi dari pembebasan mereka dari kewajiban besar ini.

5) Tarif *Jizyah*

Jizyah pertama-tama ditetapkan oleh Nabi yang jumlahnya tidak ditetapkan. Berbagai jumlah (tarif) *jizyah* ditetapkan selama masa Nabi dan Khalifah Abu Bakar. Di Zaman Rasulullah misalnya berbeda dengan masa Umar. Beban *jizyah* yang bukan merupakan sumber pendapatan permanen selama masa Nabi, kemudian disitemisasi sepenuhnya pada masa Khalifah Umar.

- a) Tarif *jizyah* di zaman Rasulullah: Rasulullah melakukan perjanjian dengan masyarakat Najran, mereka harus membayar kepada kaum Muslim berupa *Jizyah* sebesar 2000 jubah setiap tahun, mereka harus meminjamkan kepada kaum muslim 30 jubah antara pos, 30 kuda, 30 onta, dan 30 senjata yang digunakan dalam perang.

b) Tarif *Jizyah* di Zaman Umar Bin Khattab

Tak lama setelah Sawad berada di bawah kekuasaan kaum Muslim, Khalifah Umar menunjuk sahabatnya Usman bin Hunaif ke Sawad, Usman mengajukan ketetapan, atas keseluruhan ahl dzimmah, kecuali anak-anak dan wanita, jumlah jizyah berbeda sesuai dengan kemampuan mereka membayar, jumlah tersebut sebagai berikut:

Tabel 6
Tarif Jizyah di Zaman Umar Bin Khattab

No.	Subjek	Tarif
1	Pekerjaan manual dan orang miskin, pembajak tanah, petani dan sebagainya	12 dirham per tahun
2	kelompok berpenghasilan menengah	24 dirham per tahun
3	Orang kaya, seperti pedagang pakaian, pemilik kebun, pedang umum, dan lainnya yang memiliki pekerjaan dan berdagang	48 dirham

Dari uraian diatas bahwa penetapan jumlah atas katogeri msayarakat berbeda-beda sesuai dengan prinsip umum keadilan yang harus ditaati. Jumlah dan sturukturnya harus disesuaikan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi para pembayar pajak.⁶⁶

c. ***Kharaj***

1) Pengertian *Kharaj*

Al-Mawardi menjelaskan bahwa *al Kharaj* adalah pungutan yang harus dibayar atas tanah yang direbut dan ditaklukkan oleh kaum muslimin dari orang kafir dan dibiarkan di tangan yang

⁶⁶ *Ibid.*

mengusahakannya. *Al-Kharaj* dalam bahasa Arab dipergunakan sebagai nama sewaan atau hasil penggunaan sesuatu barang atau lahan. Islam membenarkan adanya pajak atau kharaj yang pengaturannya berdasarkan ijtihad para imam. Pemerintah berhak menarik pajak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, pajak menjadi wajib dengan kondisi negara sangat membutuhkan.⁶⁷

Secara harfiah, *Kharaj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, *Kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar pada Islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah pemilik atas wilayah itu, dan pengelola harus membayar sewa kepada Negara Islam. Apabila *Jizyah* ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur'a, maka *kharaj* (pajak) ditetapkan berdasarkan Ijtihad. *Kharaj* (pajak) dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil. Sebagaimana firman Allah Swt:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿٧٢﴾

Artinya:

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan dia adalah pemberi rezeki yang paling baik. (QS Al-Mu'minun (40) : 72)

⁶⁷ Kazwaini, "Epistimologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi". *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 41 No. 1, ISSN 2407-1706, h. 85.

2) Objek *Kharaj*

Kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proposional) yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah pemilik seorang yang dbawah umur, seorang dewasa, budak, muslim maupun non muslim. Kahraj dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang.

3) Dasar pengenaan *Kharaj* dan Tarif *Kharaj*

Tarif *Kharaj* dibagi menjadi dua cara pengenaannya, yaitu *kharaj* menurut perbandingan atau propesional (*muqasamah*) dan *kharaj* tetap (*muwadhdhaaf*). *Kharaj* secara professional artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian, misalnya seperlima, seperempat, dan sebagainya. Dengan kata lain propesioanal adalah tidak tetap tergantung pada hasil dan harga setiap hasil pertanian. *Kharaj* tetap artinya pajak tetap atas tanah dikenakan pada setahun sekali dalam jumlah tetap.⁶⁸

5. Hubungan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak parkir dikatakan memiliki kontribusi besar apabila memiliki hasil lebih 50% persen. Menurut Siahaan , Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak parkir

⁶⁸ Gusfahmi, *edisi Revisi Pajak Menurut, ...* h. 111.

adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayah tersendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pendapatan Asli Daerah dapat berupa hasil pajak dan retribusi daerah, salah satunya yang menjadi pajak daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah yakni pajak parkir.⁶⁹



C. Retribusi

1. Retribusi Secara Umum

Selain pajak, pemerintah melakukan pungutan lain yaitu retribusi. Terdapat perbedaan yang mendasar antara pajak dan retribusi baik sumber, mekanisme pemungutannya maupun prestasi yang didapat dari pembayar. Hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social-ekonomi yang layak dijadikan sebagai objek retribusi.

⁶⁹ Agus Endro Suarno dan Suhartiningsih, “Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Akutansi dan Keuangan*, Vol 7 No. 2, 2008, h. 164

a. Teori dan Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁷⁰

Pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat akan tetapi dalam proses penyediaan barang publik dan jasa publik kepada masyarakat yang dibutuhkan biaya untuk menjaga ketersediaannya alokasi barang dan jasa tersebut. Maka dari itu pemerintah memerlukan penerapan kebijakan harga atau yang disebut *tariff/charges*.⁷¹

Tarif atau *charges* atau retribusi merupakan suatu sistem pembayaran atau sistem tagihan biaya dimana seseorang mengkonsumsi suatu barang atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. *User Charge* adalah harga yang dikenakan pemerintah untuk layanan tertentu atau khusus yang digunakan untuk membayar semua biaya penyediaan layanan tersebut. Selain itu adapula yang mendefinisikan *user charges* sebagai *beneficiary charges*, dimana didefinisikan suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Menurut Munawir, Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah

⁷⁰ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 432

⁷¹ Damas Dwi Anggito, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*..., h. 238.

yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Akan tetapi paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintahan dia tidak akan dikenakan iuran itu. Retribusi dapat diartikan sebagai pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh Pemda tersebut didasarkan atas prestasi/ pelayanan yang diberikan pemda yang dinikmati oleh masyarakat.⁷²

Berdasarkan uraian tersebut, maka karakteristik Retribusi ialah:

- 1) Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 2) Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa imbalan langsung yang ditunjukkan pada individu yang membayar.
- 3) Uang hasil retribusi didistribusikan pada bagian pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.
- 4) Pelaksananya dapat dipaksakan, biaya bersifat ekonomis.

b. **Sifat Retribusi**

Berdasarkan sifatnya, retribusi dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Sifat Pemungutannya

Dilihat dari sifatnya pemungutan hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat

⁷² *Ibid.*

ditunjuk, yang merupakan timbal balik atas atau barang yang telah disediakan oleh pemerintahan setempat.

2) Sifat Paksaannya

Pemungutan retribusi yang berdasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan yaitu barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu tertentu dari pemerintah, maka harus membayar retribusi daerah bersifat ekonomis.⁷³

c. Dasar Hukum Retribusi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 pasal 1. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.⁷⁴

2. Retribusi daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah disebut dengan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

⁷³ *Ibid.* h. 240

⁷⁴ Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Bandung: Fokusmedia, 2012), h.

Pajak Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Jenis Retribusi Daerah

Berbeda dengan pungutan pajak daerah, untuk retribusi daerah meski diatur jenis retribusi daerah tetapi melalui peraturan pemerintah masih dimungkinkan dilakukan penambahan jenis retribusi daerah selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hal demikian dimaksud untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari pemerintahan kepala daerah yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁷⁵

Jenis Retribusi selain ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 sepanjang memenuhi Kriteria sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau yang diberikan pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum sebagai berikut:

⁷⁵ Imam Soebechi, *Judical Review*, h. 143

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Sipil
 - d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan msyst
 - e) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
 - f) Retribusi Pelayanan Pasar
 - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - k) Retribusi Pengelolaan Limba Cair
 - l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m) Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi⁷⁶
- 2) Retribusi Jasa Usaha

Objek Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerinah daerah dengan menganut prinsip komersial, jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:


- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c) Retribusi tempat Pelelangan

⁷⁶ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi*..., h. 249-254

- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i) Retribusi Rekreasi dan Olahraga
- j) Retribusi Penyebrangan di Air
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.⁷⁷

3. Retribusi Parkir

a. Pengertian Retribusi Parkir



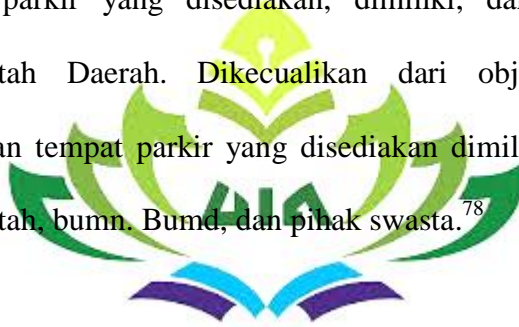
Retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang – undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir memiliki dua golongan retribusi daerah yakni jasa umum dan retribusi jasa khusus.

Retribusi parkir termasuk dalam retribusi jasa umum ialah retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sedangkan Retribusi Parkir termasuk yang termasuk dalam retribusi jasa usaha adalah retribusi pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.

⁷⁷ *Ibid.*

b. **Objek Retribusi Parkir**

Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Akan tetapi, hanya jasa- jasa tertentu saja yang menurut pertimbangan sosial- ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Sedangkan objek retribusi tempat parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.⁷⁸



4. **Retribusi Persepektif Ekonomi Islam**

a. *Ijarah*

Dalam bukunya Idris Ahmad, *Ijarah* berarti upah- mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah- mengupah, yaitu mu“jir dan musta“jir (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa- menyewa.⁷⁹

⁷⁸ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi*, h. 252

⁷⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 113

Dari kedua buku tersebut, ada perbedaan terjemahan kata *Ijarah* dari bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “ para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *Ijarah*. *al- Ijarah* berasal dari kata *al- Ajru* yang artinya menurut bahasanya ialah *al- Iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.

Dengan demikian pada hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁸⁰

b. **Dasar Hukum *Ijarah***

Dibawah adalah dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma.

1) Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِعْ لَهُ أُخْرَى ۚ ﴿٦٠﴾

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet- 1, 2009), h. 150.

Artinya :

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S Al-Thalaq (65) : 6)

2) Dasar Hukum *Ijarah* dalam Hadits

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar).

Artinya:”Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

Dari kedua hadits tersebut bahwa retribusi harus diberikan upah sebagai uang sewa yang telah kita pakai jasanya.⁸¹

3) Dasar Hukum *Ijarah* dalam *Ijma'*

Pada masa sahabat, semua umat islam sepakat. Tidak ada seorang ulam pun yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini, sekalipun ada yang membantah diantara mereka yang berbeda pendapat, hal tersebut tidak akan dianggap.

5. Hubungan Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi parkir dikatakan memiliki kontribusi besar apabila memiliki hasil lebih 50% persen. Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum,

⁸¹ Gusfahmi, *Edisi Revisi Pajak*, ... h. 210

yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.⁸²

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber yang dikembangkan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.⁸³ Dalam sebuah kajian hokum Islam pelayanan jasa termasuk katagori *Ijarah*. Akad *Ijarah* merupakan perukaran objek yang berupa manfaat dan imbalan tertentu, jika objek dalam *Ijarah* berupa barang maka dikatakan sewa menyewa akan tetapi jika objek dalam *Ijarah* berupa manfaat perbuatan maka disebut upah mengupah.⁸⁴



D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi pebandingan dan sebagai acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil - hasil penelitian yang terdahulu menyangkut kontribusi pajak parkir. Hal ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu

⁸² Stephanny Inagama Timisela, Meinarni Asnawi, dan Yundi Hafizrianda, “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol 2 No. 1, h. 6

⁸³ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan, ...* h. 19

⁸⁴ Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, “Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam”, *Suhuf*, Vol 30 No. 2, h. 230

bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian:

1. Md, Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gst Putu Wirawati dengan judul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kotadi Provinsi Bali”. Penelitian ini Bertujuan untuk menguji pangaruh pajak dan retribusi daerah secara parsial serta untuk mengetahui variabel yang lebih dominan dari kedua variable yang memepengaruhi PAD se-kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil dari analisis tersebut bahwa regresi tidak ada penyimpanan pada uji asumsi klasik dari hasil uji t yang menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, sedangkan dilihat dari kotribusinya pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yakni sebesar 84,9%, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 16,6%.⁸⁵

2. Morin M. Mosal dengan judul “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akutansi di Kota Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD kota Manado. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data sekunder.

⁸⁵ Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gst Putu Wirawati, “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali”, *E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana* 5.3 (2013), h.257.

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2008-2012 bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi tahun 2011 dan terendah tahun 2009 secara keseluruhan kontribusi pajak parkir tahun 2008-2012 memberikan kontribusi yang kurang terhadap PAD. Presentase kontribusi pajak parkir tersebut tahun 2011 dan terendah tahun 2009.⁸⁶

3. Mohammad Riduansyah dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kota Bogor.

Hasil dari penelitian ini Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 – 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 – 2000 rata-rata pertahunnya memberikan

⁸⁶ Mourin M. Mosal, ”Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akutansi di Kota Manado”, *Jurnal EMBA* Vol 1. No 4 Desember 2013, h. 374.

kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata - rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun.⁸⁷

4. Terakhir, penelitian dari Novelia Malombeke dengan berjudul “Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara”. Hasil dari Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan besarnya potensi pajak parkir di Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan metode penelitian ini deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis data dan mengitung besarnya potensi dari tahun ketahun selanjutnya beserta tingkat efektivitas pemungutannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan setiap tahun perolehan potensi pajak parkir dapat meningkat dilihat dari peningkatan tahun 2016 denngan jumlah Rp. 16.014.340, pada tahun 2017 Rp. 20.146.039, pada tahun 2018 Rp. 25.343.717, pada tahun 2019 Rp.31.882.395 dan pada tahun 2020 dengan jumlah Rp. 40.108.052 sehingga tingkat efektivitas bervariasi. Tingkat evektivitas tertinggi pajak parkir tahun 2015 bulan Desember 1,5% (150%) dibandingkan dengan bulan desember 66.66% namun melihat dari perhitungan potensi

⁸⁷ Mohammad Riduansyah, “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”, *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol 7, No 2 Desember 2003.

menunjukkan perkembangan yang baik karena selalu meningkat setiap tahunnya.⁸⁸

Setelah pemaparan dari peneliti terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti akan meneliti Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Persepektif Ekonomi Islam dengan menggunakan metode Kuantitatif Deskriptif dengan instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan data sekunder berupa data realisasi dan target PAD Periode 2016-2018.



⁸⁸ Novelia Malombeke, “Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Minahasa Utara”, *Jurnal EMBA*, Vol 4 No1 Maret 2016, h. 645.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, Ulul, "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes", *Permana*, Vol VI No 1 Agustus 2014.
- Arditia, Reza, "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya", *Jurnal Universitas Surabaya*.
- Agus Endro Suarno dan Suhartiningsih, "Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal Akutansi dan Keuangan*, Vol 7 No. 2, 2008.
- Bandar Lampung dalam Angka 2018, <https://bandarlampungkota.bps.go.id/publication/2018/08/16/faf88dfb8e10769e3678fd9b/kota-bandar-lampung-dalam-angka-2018.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Dwi Anggoro, Damas, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press, 2017.
- Guritno, T *Kamus Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Gusfahmi, *Edisi Revisi Pajak Menurut Syariah*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, "Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam", *Suhuf*, Vol 30 No. 2, 2016.
- Kazwaini, "Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi", *Jurnal An-nida' Pemikiran Islam*, Vol. 41 No. 1 2017.
- Kesek, Feisly, "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado", *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis Akutansi* Vol 1. No 4, 2013 ISSN 2302-1174.
- Krisna Arta Anggar Kusuma dan Putu Wirawati, "Anallisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penigkatan PAD Sekabupaten/kota di Provinsi Bali", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 5 No. 3, 2013.
- Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2003.

- Huda, Nurul, ed. at, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2015.
- Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: YPKN, 2016.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Malombeke, Novelia, "Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal EMBA*, Vol 4 No1 Maret 2016.
- Mediansyah, "Duh PAD Bandar Lampung Jauh dari Target hanya 17,36%". (On-Line), tersedia di: <https://www.kupastuntas.co/2018/04/duh-pad-bandar-lampung-jauh-dari-target-hanya-1736#> diakses tanggal 24 Januari 2019.
- Mourin M. Mosal, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akutansi di Kota Manado", *Jurnal EMBA* Vol 1. No 4 Desember 2013.
- Mulya Firdausy, Caruni, *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli daerah dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, cet ke 2, 2018.
- Mustafa Edwin Nasution, ed. al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta: Prenadamedia group, 2015.
- Nariana, "Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang", *Jurnal STIE MDP*, 2013.
- Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2003.
- Pahala Siahaan, Marihot *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Purwono, Herry, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akutansi Pajak*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet- 1, 2009.

Soebechi, Imam, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*, Bandung: CV Alfabeta, cetakan ke 23, 2016.

Sumitro, Rochmad, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta: Eresco, 1979.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti,, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.

TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai*, Yogyakarta : Andi, 2013.

Pahala Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Poetri Rahmadhini, Aulia, “Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Jombang”, *Jurnal Akutansi Unesa*, Vol. 3 No. 2, 2015.

Purhantara, Wahyu *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Riduansyah, Mohammad, “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”, *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol 7, No 2 Desember 2003.

Riza, Muhammad, “Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj pada Masa Umar Bin Khattab RA”, *j-EBIS*, Vol 2 No 2, 2016.

Stephanny Inagama Timisela, Meinarni Asnawi, dan Yundi Hafizrianda, “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol 2 No. 1.

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bandung: Fokusmedia, 2012.

Widya Putri, Rahmawati, “Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang”, *JESP*-Vol 8 No 1 Maret 2016.

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.



